

SINERGI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bunga Fata Faiza, S.Tr.IP*¹

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

bungafata14@gmail.com

Received: 21-03-2023, Accepted: 26-10-2023; Published Online: 30-10-2023

**Corresponding author*

Abstrak

Peningkatan penyebaran dan lahirnya varian baru virus COVID-19 serta dampaknya yang luas dan meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat menjadi dasar dari penelitian ini. Kemampuan kekebalan tubuh masyarakat dalam melawan virus menular (imunitas) perlu ditingkatkan, terlebih bagi penyandang disabilitas. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi masih menemui kendala meski telah dikeluarkan surat edaran oleh Kementerian Kesehatan RI. Para *stakeholders* di Kabupaten Sleman mencoba mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa sinergi yang terjadi antara akademisi, bisnis, komuitas, pemerintah, dan media sudah berhasil mewujudkan giat percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Sinergi yang dibangun terbukti melahirkan kekuatan yang lebih besar. Walau demikian masih terdapat kendala yang perlu dipecahkan solusinya, sehingga kedepan hasil yang didapat meningkat. *Stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman seharusnya membuat komitmen secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan dan legal di hadapan hukum. Kemudian, kegiatan vaksinasi sebaiknya disusun perencanaannya secara matang dari jauh-jauh hari agar kegiatan di waktu mendatang dapat berjalan lebih baik. Sinergi yang dilakukan seluruh aktor dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan imunitas dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat diketahui, sebab penyandang disabilitas menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu oelh kemudahan yang disediakan para *stakeholders*

Kata Kunci : COVID-19, Vaksinasi, Penyandang Disabilitas, Sinergi

Abstract

Increasing the spread and birth of new variants of the COVID-19 virus and becoming wider and covering all sectors of basic community life from this research. The ability of the community's immune system to fight infectious viruses (immunity) needs to be improved, especially for people with disabilities. So far, the implementation is still facing obstacles despite the issuance of a circular by the Indonesian Ministry of Health. Stakeholders in Sleman District are trying to overcome this. This study aims to analyze the synergy of

implementing COVID-19 vaccination for Persons with Disabilities in Sleman Regency. Research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data was collected by using interview, observation, and documentation techniques. The data analysis technique uses the stages of data reduction, data presentation, and verification. The results of the research and analysis show that the synergy between academia, business, community, government, and media has succeeded in realizing the acceleration of vaccination for persons with disabilities. The synergy that has been built has proven to give birth to greater strength. However, there are still obstacles that need to be solved, so that in the future the results obtained will increase. Stakeholders involved in the implementation of the acceleration of disability vaccination in Sleman Regency should make a written commitment to be accountable and legal before the law. Then, vaccination activities should be carefully planned from a long time ago so that future activities can run better. The synergy carried out by all actors in the implementation of COVID-19 vaccination for persons with disabilities in Sleman Regency in an effort to realize immunity can be said to be successful. This can be seen, because people with disabilities say that they feel helped by the facilities provided by the stakeholders.

Keywords: COVID-19, Vaccination, Disability People, Synergy

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi problematika pelik yang dihadapi masyarakat global sejak akhir tahun 2019 silam. Penyebaran coronavirus yang menginfeksi saluran pernapasan manusia ini terjadi dengan mudah dan cepat. Seseorang dapat tertular hanya dengan menyentuh benda-benda atau permukaan sekitar yang terkena percikan- percikan dari hidung atau mulut pasien COVID-19. Kasus COVID-19 dikonfirmasi masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam perkembangannya, penyebaran virus ini cenderung meningkat. Mahardika (2021), Anggota Tim Pakar Medis Satgas COVID-19, pada laman covid19.go.id menyatakan bahwa virus ini mudah berubah, mengalami mutasi, dan melahirkan varian baru. Ada dua jenis yang menjadi fokus, yakni varian Alfa (B.1.1.7) dan Delta (B.1.617).¹ Masuknya varian virus corona baru di Indonesia menandakan bahwa upaya penanganan terhadap wabah harus terus berlanjut.

Vaksinasi akhirnya dijadikan *game changer* oleh pemerintah untuk mewujudkan *herd immunity* atau kekebalan komunal. Vaksin disebut sebagai cara paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular (Makmum & Hazhiyah, 2020).² Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, vaksinasi dosis lengkap secara signifikan dapat menurunkan risiko dan mencegah COVID-19 bergejala berat seperti perawatan, komplikasi,

¹ Ahli : Cara Terbaik Cegah Penularan Covid-19 Dengan Hindari Kerumunan Dan Vaksinasi', *Covid19.Go.Id*, 2021 <<https://covid19.go.id/p/berita/ahli-cara-terbaik-cegah-penularan-covid-19-dengan-hindari-kerumunan-dan-vaksinasi>> [accessed 3 September 2021].

² Makmum & Hazhiyah, 'Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID-19', *Molucca Medica*, 2020, 52.

hingga kematian.³ Sasaran vaksinasi hingga tahap akhir yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah 208.265.720 jiwa yang terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat umum usia 12-17 tahun dan kelompok rentan lainnya.⁴

Pelaksanaan vaksinasi ditargetkan selesai dalam jangka waktu 15 bulan oleh Kementerian Kesehatan RI, sehingga akan berlangsung selama dua periode. Periode pertama (Tahap I) dengan prioritas sasaran tenaga kesehatan telah dilaksanakan pada Januari hingga April 2021. Selanjutnya, periode kedua (Tahap II) bagi kelompok lanjut usia dan petugas publik yang berlangsung telah menacapai 28 juta orang untuk dosis pertama dan 13 juta orang untuk dosis kedua terhitung pada tanggal 29 Juni 2021.

Vaksinasi kemudian dilanjutkan pada fase III yang diperuntukkan bagi kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya sesuai dengan Surat Edaran HK.02.02/I/1727/2021 tentang vaksinasi fase 3 pada kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun. Pemberlakuan Vaksinasi Tahap 3 ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Sleman. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, diketahui jumlah sebaran masyarakat rentan khususnya penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	Gamping	632
2	Godean	586
3	Moyudan	388
4	Minggir	445
5	Seyegan	296
6	Mlati	364
7	Depok	501
8	Berbah	379
9	Prambanan	363
10	Kalasan	385
11	Ngeplak	573

³ 'Vaksin Teruji Mampu Beri Perlindungan Terhadap Varian Baru', *Covid19.Go.Id*, 2021 <<https://covid19.go.id/p/berita/vaksin-teruji-mampu-beri-perlindungan-terhadap-varian-baru>> [accessed 3 September 2021].

⁴ 'Vaksinasi Covid-19 Nasional', *Vaksin.Kemkes.Go.Id*, 2021 <<https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>> [accessed 3 September 2021].

1	2	3
12	Ngaglik	342
13	Sleman	560
14	Tempel	514
15	Turi	317
16	Pakem	432
17	Cangkringan	406
Total		7.483

Sumber: Dinas Sosial Sleman diolah oleh peneliti, 2021

Berdasar tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman mencapai angka 7.483 orang. Jumlah ini diketahui meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang baru mencapai 5.535. Ketika itu pun, Kabupaten Sleman menduduki urutan kedua dengan sebaran penyandang disabilitas terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perbandingan Kabupaten Kulonprogo 4.399 orang, Kabupaten Bantul 5.437, Kabupaten Gunungkidul 7.860, dan Kota Yogyakarta sebanyak 1.913 orang.⁵ Namun, berdasar data yang dihimpun pada tahun 2021 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, total penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang tervaksin baru mencapai 432 orang. Jumlah ini masih jauh dari total penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman sehingga perlu mendapat perhatian lebih.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 62 Ayat (3) Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dijelaskan sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mempunyai hambatan dalam berinteraksi dengan warga Negara lainnya. Ketika seseorang dengan disabilitas yang membutuhkan kehadiran orang lain baik dalam proses perawatan maupun pendampingan terpapar virus COVID-19, maka pemberlakuan jarak sosial atau isolasi mandiri cukup sulit diwujudkan.

Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan berbagai pihak yang terlibat memiliki peran esensial terhadap pelaksanaan Vaksinasi secara umum dan secara khusus bagi penyandang disabilitas. Untuk menemukan jalan keluar atas

⁵ Aris Widiyanto, 'Implementasi Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Dan Perlindungan', 2016

beragam permasalahan yang menyangkut kewenangan dan tanggungjawab dari banyak pihak serta agar memperoleh hasil yang maksimal maka perlu dilakukan sinergi atau kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan melibatkan para *stakeholders* penta helix.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengkaji lebih lanjut terkait sinergi pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan menganalisis pelaksanaan sinergi, menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis upaya peningkatan sinergi pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN LITERATUR

1. Sinergi

Sinergi adalah aktivitas tertinggi dari penghidupan. Ia merupakan ujian dari seluruh kebiasaan yang disatukan, kemudian diciptakan alternatif baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Proses ini terdiri dari kelompok yang setuju untuk mengesampingkan formula lama dan menulis formula baru. Dikemukakan oleh (Covey, 2015) dalam bukunya yang berjudul 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif (*The 7 Habbits of Highly Effective People*) bahwa “Sinergi berarti keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya”.⁶ Pendapat Covey tersebut mengandung makna bahwa total kekuatan yang diinisiasi bersama akan melahirkan kekuatan yang lebih besar. Lebih besar disini memiliki arti bahwa sinergi memiliki banyak bagian yang berkumpul menjadi satu, melakukan kegiatan dengan prinsip dan tujuan yang sama.

Apabila sebuah bagian memisahkan diri, atau keluar dari lingkaran sinergi maka kekuatannya tidak sebanding dengan proses sinergi yang terjadi. Satu bagian ini tak akan berarti apa-apa. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sinergi dapat terjadi dimanapun dan oleh pihak manapun. Keberhasilannya berasal dari kuantitas dan kualitas komunikasi yang kreatif serta efektif.

Beberapa bagian yang berkumpul pasti memiliki karakteristik yang berbeda sehingga harus dilakukan penyesuaian agar disintegrasikan atau perpecahan di tengah proses sinergi tersebut dapat dihindari. Esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengimbangi kelemahan.⁷

⁶ Covey.

⁷ Covey.

Dengan kata lain bersinergi adalah proses untuk saling mengisi kekosongan yang satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan. Proses saling mengisi guna mewujudkan sebuah sinergi memerlukan beberapa syarat, yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas.⁸

2. Sinergitas Aktor Pentahelix

Penta helix sebagai sebuah model kolaborasi sinergis, ramai digunakan berkat komposisinya yang strategis. Kolaborasi sinergis diharapkan dapat mewujudkan suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berkembang dengan sinergis.⁹ Model ini merupakan perkembangan dari model triple helix dan quadruple helix yang dikemukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff.¹⁰ Dalam sebuah jurnal milik (Soemaryani, 2016) penta helix dijelaskan sebagai referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait, di dalam mendukung optimalisasi pencapaian tujuan.¹¹

Selain itu sinergitas model penta helix antar pemangku kepentingan digambarkan oleh Mohr dan Spekman (1994) dalam (Muhyi, et al. 2017) dalam tiga aspek, yaitu *attribute, communication behavior, and conflict resolution techniques*.¹² *Attribute*, merupakan bentuk dari konstruksi terkait proses membantu memandu arus informasi antar mitra yang terdiri dari beberapa indikator atau ukuran meliputi *commitment, coordination, interdependence, trust, and power*.¹³

Communication behavior, menyatakan bahwa kerjasama atau partnership harus meliputi *effective communication, including communication quality, information sharing, and participation in goal and planning*. Kemudian, pada *conflict resolution techniques*, mengartikan bahwa dampak dari resolusi konflik pada suatu hubungan dapat bersifat destruktif maupun positif. Hal ini kemudian akan berimplikasi pada keberhasilan suatu kemitraan.

Penta yang berarti lima dan helix yang artinya jalinan, menggambarkan bahwa didalamnya terdapat lima aktor yang terdiri dari *academician, business, community,*

⁸ Mukhtaromi dkk, 'Sinergi Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi Pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kabupaten Pasuruan)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (2012).

⁹ Herawan .A dkk Muhyi, 'The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City', *Review of Intergarive Business & Economics Research*, 2017.

¹⁰ Siti .N Wahida, *Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Model Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Heritage Kajoetangan Di Kota Malang* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

¹¹ Imas Soemaryani, 'Pentahelix Model to Increase Tourist Visit to Bandung and Its Surrounding Areas Trough Huan Resource Development', *Academy of Strategic Management Journal*, 2016.

¹² Muhyi.

¹³ Muhyi.

government, dan media (ABCGM).¹⁴ Setiap aktor memiliki peran yang besar dalam proses pencapaian tujuan bersama. Setiap aktor akan memberi sumbangsih sesuai dengan keahliannya Peran dan fungsi dari aktor-aktor tersebut dijabarkan oleh (Yunas, 2019) secara jelas. Akademisi memiliki peran sebagai konseptor, pihak yang berperan dalam melakukan riset pada hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bersama.¹⁵ Sektor bisnis swasta berperan sebagai *enabler*, yaitu yang memberikan modal maupun infrastruktur teknologi. Komunitas sebagai akselerator, yakni pihak yang menjembatani masalah dengan pemberi solusi. Biasanya komunitas adalah kelompok orang yang memiliki minat atau relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Pemerintah, yakni aktor penta helix yang memiliki andil berupa kontroler atau yang memiliki dasar aturan dalam mencapai tujuan. Terakhir adalah media, pihak yang bertindak sebagai *expenders*, pencetak brand image bagi visi kolaborasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penta helix untuk menganalisa sinergi yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada penyandang disabilitas atas dasar kompleksitas masalah yang dihadapi serta ketidakmampuan suatu pihak untuk bergerak sendiri dalam mencapai tujuan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana peneliti mengamati fenomena atau masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian, dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang peneliti lakukan untuk memperoleh data adalah wawancara mendalam dengan 7 informan, yang terdiri dari pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (unsur pemerintah), kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman (unsur pemerintah) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman (unsur pemerintah), Ketua PPDI Kabupaten Sleman (unsur masyarakat), Tribun Jogja (unsur media), Kepala SLB N 1 Sleman (unsur akademisi), dan Koordinator Vaksinasi Massal dan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Pemerintah Sleman (unsur bisnis). Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini secara berturut-turut mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, guna mendapatkan interpretasi berupa gambaran masalah dan hubungan antar fenomena, sehingga dapat disimpulkan permasalahan terkait sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

¹⁴ Muhyi.

¹⁵ Novi .S Yunas, 'Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur', Jurnal Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/I/1727/2021/Tentang Vaksinasi Tahap 3, percepatan kegiatan vaksinasi ini dilakukan guna mencapai *herd immunity* dan mengurangi dampak akibat virus COVID-19 serta mencegah paparan virus, mengingat maraknya varian virus baru yang muncul. Dalam upaya menuntaskan dua dosis vaksinasi pada masyarakat rentan ini, pihak-pihak yang terkait perlu memperkuat upaya komunikasi dan sosialisasi dalam rangka percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas serta mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi khusus yang sesuai dengan situasi daerah masing-masing dalam meningkatkan jangkauan bagi penyandang disabilitas. Konsep penta helix merupakan model kolaborasi sinergis dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media yang dicetuskan guna mencapai satu visi yang sama, dalam hal ini pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

1. Sinergitas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

Sinergitas merupakan perwujudan dari sebuah kekuatan besar dimana berbagai pihak saling menopang untuk mewujudkan satu visi yang sama. Sinergitas model penta helix diyakini sebagai terobosan baru dalam melakukan penyelesaian pada masalah-masalah yang kompleks sebab melibatkan lima aktor dengan bidang dan peran yang berbeda. Dalam penelitian ini proses sinergi yang terjadi antar aktor penta helix dalam percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman akan diungkap dan dianalisis dalam beberapa variabel yang dikemukakan oleh Mohr dan Spekman (1994) dalam (Muhyi, et al.2017) yaitu atribut, perilaku komunikasi, dan teknik resolusi konflik.

1.1 Atribut

Atribut dalam sinergitas penta helix terdiri dari beberapa indikator yaitu komitmen, koordinasi, kepercayaan, kekuatan, dan saling ketergantungan. Artinya kelima indikator tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dalam proses bersinergi. Lima indikator harus dipenuhi oleh masing-masing aktor. Berdasar hasil pemetaan yang dilakukan peneliti, dapat dilihat bahwa setiap aktor yang terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok dan fungsi atau perannya masing-masing. Dalam bersinergi setiap dari mereka memiliki kedudukan yang sama. Artinya satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Berdasar hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan aktor ABCGM koordinasi menjadi indikator paling dominan yang dimiliki aktor penta helix.

Berdasar keterangan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, jumlah penyandang disabilitas yang sudah melakukan vaksinasi kedua adalah sebanyak 80% dengan 20% penyandang disabilitas yang belum melaksanakan vaksin adalah mereka yang berkormorbid dan mereka yang tidak mendapatkan rekomendasi (tidak diperbolehkan melakukan vaksin) oleh dokter.

Selanjutnya, untuk dapat berjalan sejauh itu tiap aktor yang terlibat memiliki komitmen satu sama lain sehingga bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini juga dibangun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dengan upaya masing-masing aktor untuk menghilangkan ego sektoral diantara masing-masing sektor. Meskipun tidak semua komitmen para aktor ABCGM ini diwujudkan secara resmi atau tertulis, namun pada kenyataannya kegiatan percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman secara umum berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi ini, namun berkat adanya komitmen, koordinasi, saling ketergantungan, dan rasa kepercayaan yang tinggi, pada kesempatan selanjutnya, pelaksanaan kegiatan vaksinasi berjalan lebih cepat.

1.2 Perilaku Komunikasi

Dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, para aktor penta helix melakukan komunikasi dua arah dengan berbagai bentuk, yaitu formal, non-formal, langsung, dan tidak langsung. Salah satu bentuk komunikasi formal yang diwujudkan adalah rapat internal panitia penyelenggara kegiatan vaksinasi yang terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, dan pemerintah yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Selanjutnya, untuk pihak media dihubungi oleh pihak dinas selaku pemerintah untuk melakukan publikasi ke media sosial guna menyukseskan kegiatan vaksinasi. Aktor akademisi dalam hal ini adalah para guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) selain melakukan komunikasi formal dengan pihak ABCGM lainnya, mereka juga menajalin komunikasi dengan para penyandang disabilitas, yaitu sebagai edukator terkait pentingnya vaksinasi. Secara daring mereka memberikan edukasi rutin kepada anak dengan disabilitas di Kabupaten Sleman berikut dengan kedua orang tuanya.

Pihak bisnis yaitu Manajemen Sleman *City Hall* melakukan komunikasi langsung dengan Dinas Kesehatan terkait jadwal pelaksanaan vaksin. Menurut keterangan dari Bapak Devilito, tidak jarang pihak dinas memberikan informasi yang mendadak kepada pihak SCH terkait pelaksanaan vasinasi. Namun, berdasar keterangan beliau hal ini terjadi pada kesempatan ke dua dan seterusnya sehingga tidak mempengaruhi performa mereka dalam memberikan fasilitas serta pelayanan vaksin. Komunitas yang digandeng Pemerintah Daerah

Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Wilayah Kabupaten Sleman. PPDI ini merupakan organisasi resmi yang berada di bawah pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Kesehatan akan meminta data disabilitas kepada pihak yang membinanya yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial kemudian memberikan data yang telah dikumpulkan bersama-sama dengan PPDI.

Dinas sosial tak hanya memberikan data penyandang disabilitas kepada Dinas Kesehatan namun juga sebagai perantara antara Dinas Kesehatan dan masyarakat penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyaluran informasi terkait kegiatan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Dalam penyaluran informasi, Dinas Sosial menggunakan media non-formal dan memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu whatsapp grup serta komunitas-komunitas yang dekat dengan para penyandang disabilitas. Hal ini dapat disebut sebagai langkah yang efektif dan efisien dalam menyalurkan informasi.

1.3 Teknik Resolusi Konflik

Sebuah kegiatan maupun tujuan yang melibatkan banyak pihak pasti tidak menutup kemungkinan akan memunculkan berbagai permasalahan yang terduga maupun yang tidak terduga. Begitupun dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman ini juga menemui berbagai kendala. Dalam upaya percepatan vaksinasi penyandang disabilitas yang telah dilakukan tersebut nyatanya terdapat kendala di lapangan berupa sulitnya penyandang disabilitas melakukan mobilisasi secara mandiri dari kediamannya menuju sentra vaksin. Oleh karenanya, Dinas Sosial memberikan solusi terkait angkutan dan mobilisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Permasalahan lain yang terjadi dalam proses sinergitas pelaksanaan vaksinasi penyandang disabilitas ini adalah ketakutan penyandang disabilitas untuk melaksanakan vaksin, terlebih penyandang disabilitas yang masih berada pada usia produktif. Selain ketakutan dari diri mereka sendiri, banyak pula ketakutan muncul dari pihak keluarga. Untuk mengatasi permasalahan ini, tenaga pendidik mengerahkan kemampuannya dalam mengedukasi penyandang disabilitas. Mereka mencoba memberikan pemahaman melalui kalimat-kalimat dan metode-metode yang mudah dipahami.

Terakhir, kendala yang saat ini dihadapi oleh para aktor penta helix khususnya bagi Dinas Sosial adalah tidak adanya rekap data secara detail tentang penyandang disabilitas yang telah melaksanakan vaksin. Tidak diketahuinya data seperti nama dan Alamat

penyandang disabilitas yang sudah melakukan vaksin disebabkan karena setelah pelaksanaan vaksin input data hanya dilakukan langsung di peduli lindungi dan tidak adanya penyediaan bahan data yang bisa diakses. Bahkan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara utama kegiatan vaksinasi tidak lagi dapat mengakses dan mengelompokkan data tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Dinas Sosial juga Dinas Kesehatan untuk melakukan filter dan pemberian vaksinasi lanjutan dosis ke tiga. Oleh sebab itu, saat ini dinas tidak dapat mengetahui siapa yang belum melakukan vaksin beserta alasannya. Sementara ini, solusi yang dipilih Dinas Sosial adalah mendata ulang, *door to door* untuk memastikan data valid vaksinasi penyandang disabilitas.

2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kolaborasi dalam proses percepatan kegiatan vaksinasi penyandang disabilitas di Kabutapen Sleman dapat dikatakan memuaskan. Sebab, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ibu Laminem, SH. dalam wawancaranya bahwa ketercapaian kegiatan vaksinasi sudah mencapai 80%. Beliau juga menjelaskan bahwa 20% penyandang disabilitas yang belum mendapatkan fasilitas vaksin atau imunisasi adalah mereka yang memiliki komorbid, tidak mendapat rekomendasi dari dokter, dan jenis-jenis disabilitas tertentu.

Keberhasilan yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan ini nyatanya tak luput dari hambatan. Salah satu hal dasar yang menjadi hambatan adalah terkait bentuk komitmen yang dibangun dalam proses kolaborasi. Hampir seluruh pihak (aktor) yang terlibat mengungkapkan bahwa tidak ada bentuk komitmen legal di atas kertas yang dilakukan sebelum pelaksanaan kolaborasi.

Faktor penghambat lainnya yang menyebabkan kegiatan percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas tidak maksimal terletak pada beberapa agenda vaksin yang mendadak. Mendadak dalam hal ini adalah penyampaian informasi dan permohonan kolaborasi dengan pihak lain yang terlalu dekat dengan tanggal pelaksanaan vaksin. Sebagai contoh, hal ini pernah terjadi pada vaksinasi penyandang disabilitas yang oleh Dinas Kesehatan yang mendapat permohonan dari PKK Kabupaten Sleman untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi di Pendhopo Bupati Sleman. Menurut pengamatan peneliti, hal ini cenderung merujuk pada kepentingan salah satu kelompok dengan mengedepankan ego sektoral yang bertujuan untuk menciptakan suatu citra di kalangan masyarakat penyandang disabilitas diluar dari manfaat pemberian vaksinasi itu sendiri.

Contoh lainnya adalah pelaksanaan vaksinasi penyandang disabilitas yang dilakukan secara massal di Sleman *City Hall*. Bapak Devilito Megananda dalam wawancaranya dengan

peneliti sempat menceritakan bahwa pihak Dinas Kesehatan pernah melakukan koordinasi secara non formal pada H-1 kegiatan vaksinasi, yaitu permohonan penyediaan fasilitas berupa tempat dan personil bantuan untuk kegiatan vaksin tersebut. Walaupun Bapak Devilito menjelaskan bahwa mereka dapat menyanggupi permohonan tersebut sebab sumber daya manusia dari Sleman *City Hall* sudah terlatih dalam eksekusi suatu kegiatan. Namun hal ini tentu saja harus diminimalisir, sebab kedepannya sangat mungkin jika tidak semua mitra sanggup melakukan perannya dengan baik bila informasi dan koordinasi dilakukan dalam rentang waktu yang terlewat singkat.

3. Upaya dalam Meningkatkan Sinergitas Pelayanan Vaksinasi Disabilitas

Identifikasi dari permasalahan yang muncul dalam kegiatan percepatan vaksinasi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dapat dilakukan secara maksimal setelah kegiatan tersebut berlangsung. Hasil dari identifikasi masalah tersebut tentu tidak boleh berhenti sampai disitu saja. Perlu adanya konklusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut untuk memberikan peningkatan pelayanan dan pencapaian hasil yang lebih maksimal pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terkait dengan permasalahan atau faktor penghambat yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya maka peneliti memberikan solusi diantaranya adalah pembentukan prosedur yang sesuai dengan visi misi, kemudian disahkan secara resmi agar dapat mengikat secara hukum seluruh komponen yang nantinya terlibat dalam proses kolaborasi. Prosedur dibuat dengan maksud agar para *stakeholders* atau aktor penta helix memiliki pedoman, rambu-rambu, maupun batasan dalam berkolaborasi. Solusi yang ditawarkan peneliti terkait hambatan yang berkaitan dengan manajemen waktu dalam berkoordinasi dan pendistribusian informasi adalah dengan membuat timeline. Penyusunan timeline ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform digital yang ada sehingga dapat mempermudah dalam pemantauan kegiatan. Bila salah seorang aktor mengambil tindakan yang merugikan maupun menimbulkan masalah maka dapat segera ditangani. Pun sebaliknya, apabila salah satu aktor memiliki inovasi atau usulan baru yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman maka bisa segera ditampung dan difasilitasi. Pada era digital seperti ini, prosedur hitam di atas putih merupakan sesuatu yang penting, namun prosedur yang ada hendaknya tidak bersifat kaku dan eksklusif, sebab akan menghambat lahirnya inovasi dan ide-ide baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses sinergi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman secara umum berjalan dengan lancar. Kemudian guna mendukung mobilisasi mandiri dari kediamannya menuju sentra vaksin, Dinas Sosial memberikan fasilitas angkutan (mobil jemputan) untuk penyandang disabilitas, baik angkutan milik Dinas Sosial maupun milik pemerintah desa setempat.
2. Capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman telah mencapai angka 80%, namun sayangnya sejak awal proses kolaborasi tidak ada bentuk komitmen resmi yang dilakukan para *stakeholders*. Selain itu pendistribusian informasi yang diberikan aktor satu kepada aktor lainnya terlalu mendadak.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proses sinergi dalam pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas adalah dengan mulai menyusun prosedur kerja dan merancang pembuatan timeline kegiatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Covey, S. R. 2015. *7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif*. Jakarta: Dunamis Intra Sarana.
- Usman, H., & Setiadi Akbar, P. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*.
- Ismail, N., & Sri Hartati. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Makmum & Haziyah. 2020. "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID-19". *Molucca Medica*.
- Muhyi, H. A. dkk. "The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City". *Review of Intergarive Business & Economics Research*.

- Mukhtaromi, dkk. 2012. “Sinergi Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi Pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kabupaten Pasuruan)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Soemaryani., Imas. 2016. “Pentahelix Model to Increase Tourist Visit to Bandung and Its Surrounding Areas Trough Huan Resource Development”. *Academy of Strategic Management Journal*.
- Wahida, S., N. 2019. “Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Model Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Heritage Kajoetangan Di Kota Malang”. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yunas, N., S. 2019. “Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*.
- Ahli : “Cara Terbaik Cegah Penularan Covid-19 Dengan Hindari Kerumunan Dan Vaksinasi”. Covid19.Go.Id, 2021 <<https://covid19.go.id/p/berita/ahli-cara-terbaik-cegah-penularancovid-19-dengan-hindari-kerumunan-dan-vaksinasi>> [accessed 3 September 2021].
- Hakam, “Paparan Pakar Genetika UGM Tentang Dampak Varian Baru Covid-19”.Ugm.Ac.Id, 2021 <<https://www.ugm.ac.id/id/berita/21203-paparan-pakar-genetika-ugm-tentang-dampakvarian-baru-covid-19>> [accessed 3 September 2021]
- Maharani, Shinta, “Cerita Nuning, Pejuang Vaksinasi Covid-19 Untuk Difabel Di Yogyakarta”. Tempo.Co, 2021 <<https://nasional.tempo.co/amp/1495267/cerita-nuning-pejuang-vaksinasicovid-19-untuk-difabel-di-yogyakarta>> [accessed 5 September 2021] “Vaksin Teruji Mampu Beri Perlindungan Terhadap Varian Baru” Covid19.Go.Id, 2021 <<https://covid19.go.id/p/berita/vaksin-teruji-mampu-beri-perlindungan-terhadap-varianbaru>> [accessed 3 September 2021]
- Widiyanto, Aris, ‘Implementasi Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Dan Perlindungan’, 2016 <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/karya_perencanaan/detail/49-implementasi-jaminankesehatan-khusus-jamkesus-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan> [accessed 16 November 2021]